

Nama : RIKKI YUFRIZA  
NPM : 231212010P  
Mata Kuliah : Akuntansi Publik

## Resume Penganggaran Sektor Publik

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi:

1. Aspek perencanaan
2. Aspek pengendalian
3. Aspek akuntabilitas publik.

Anggaran publik adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana prosial yang menyatakan:

1. Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran / belanja)
2. Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- b. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas.
- c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:

1. Sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi
2. Alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembalajaan yang dibakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
3. Alat kebijakan fiskal, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Alat politik digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut.
5. Alat koordinasi dan komunikasi, akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Alat Penilaian Kinerja, Dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dalam pencapaian anggaran yang telah ditetapkan
7. Alat motivasi, digunakan untuk manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
8. Alat menciptakan ruang publik, Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

Anggaran sektor publik di bagi menjadi dua, yaitu:

1. Anggaran Operasional, digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan.
2. Anggaran Modal / Investasi menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya.

Prinsip-prinsip anggaran sektor publik meliputi:

a. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

b. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah

c. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja harus terkompak dalam dana umum

d. Non discretionary Appropriation

Jumlah yang disetujui oleh dewan eksekutif legislatif harus terkompak secara ekonomis, efisien dan efektif.

e. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodis, dapat bersipat tahunan, maupun multi tahunan

f. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi (hidden reserve) yang dapat disajikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran

g. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan

h. Diketahui Publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan yaitu:

1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.
2. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
3. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
4. Meningkatkan transparansi dan pertanggung jawaban pemerintah kepada DPR/DPD dan masyarakat luas.

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik (Henley et al, 1990). Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdistribusi:

- a. Tahap Persiapan Anggaran (Budget Preparation)  
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan atas taksiran pendapatan yang tersedia.
- b. Tahap Ratifikasi Anggaran (Budget Ratification)  
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat.
- c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (Budget Implementation)  
Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal yang terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.
- d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi (Reporting and evaluation)  
Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemui banyak masalah.